KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mahkamah Temukan Pelanggaran Baru
Tanggal : Selasa, 15 September 2015
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

Mahkamah Temukan Pelanggaran Baru

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menemukan pelanggaran baru dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik kunjungan delegasi DPR ke Amerika Serikat. Mahkamah mempersoalkan kekosongan kursi DPR ketika Setya Novanto memutuskan menambah lawatannya hingga 10 hari.

Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya, Fadli Zon, seharusnya kembali beraktivitas di Tanah Air pada 4 Agustus setelah menghadiri "The 4th World Conference of Speakers of Parliaments" yang diselenggarakan Inter Parliamentary Union (IPU) selama 31 Agustus hingga 2 September lalu. Namun, kenyataannya, rombongan memperpanjang lawatan hingga 12 September untuk melakukan safari politik ke Washington, D.C. dan kota lain di Amerika Serikat.

"Jadi, ada kekosongan pimpinan DPR akibat perpanjangan kunjungan itu. Ini bagaimana hukumnya kekosongan pimpinan itu perlu diselidiki," ujar Wakil Ketua Mahkamah Junimart Girsang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Karena itu, dalam penyelidikan pendahuluan, Mahkamah akan memanggil sejumlah pihak yang mengerti persoalan ini. Seperti Sekretariat Jenderal DPR serta pejabat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen. "Selanjutnya pemanggilan duta besar di New York sana, apakah dia memfasilitasi pertemuan setelah tanggal 3 dan seterusnya," ujar Junimart.

Tak hanya itu, Mahkamah bersiap melibatkan penegak hukum bila menemukan penyelewengan anggaran dalam kunjungan ke Amerika Serikat. Sebab, Sekjen DPR mengakui pembengkakan jumlah rombongan yang berangkat dari semula seharusnya hanya tujuh orang, bertambah menjadi 21 orang.

"Kalau pelanggaran di luar kode etik memang bukan urusan kami, tapi kami bisa bekerja sama dengan penegak hukum lain, seperti BPK dan Kepolisian, untuk mengusut penyimpangan anggaran itu," kata Junimart.

Fadli Zon mengatakan perjalanan rombongan DPR ke New York telah direncanakan sejak enam bulan lalu. "Semua biaya perjalanan anak-istri tidak dianggarkan. Semua bayar sendiri," kata Fadli, kemarin. Dia mengaku tak ingat jumlah rombongan yang ikut ke Amerika Serikat. "Tapi ini wajar, dan akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan."

Adapun Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Roem Kono mengatakan justru ia dan rombongan menombok biaya perjalanan. Padahal, sebagai anggota DPR bagian delegasi, seharusnya biaya perjalanan sepenuhnya ditanggung kesekretariatan.

"Kami malah *nombok* semua, selain harus membayarkan keluarga, karena dalam anggaran itu biaya perjalanan per dolar dihitung Rp 11 ribu, tapi sekarang kurs Rp 14 ribu," ujar Roem.

● INDRI MAULIDAR